# Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar

Yunis Setiawati<sup>1</sup>, Mapparenta<sup>2\*</sup>, Awaluddin<sup>3</sup>, Mukhlis Sufri<sup>4</sup>, Hukma Ratu Purnama<sup>5</sup> farqiahnurahsani20@gmail.com<sup>1</sup>, mapparenta.mapparenta@umi.ac.id<sup>2\*</sup>, awaluddin.awaluddin@umi.ac.id<sup>3</sup>, mukhlis.sufri@umi.ac.id<sup>4</sup>, hukmaratu.purnama@umi.ac.id<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia <sup>2\*,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh industri besar dan sedang terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data yang diolah adalah data publikasi Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2016-2020. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai nilai Sig. 0,010 < 0,05 dan nilai t hitung 9,951 > 4,303. Maka dapat disimpulkan bahwa output industri besar (X1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kota Makassar. Nilai Sig.biaya output industri sedang 0, 437 > 0,05 dan nilai t hitung 0,963 < 4,303. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya output industri sedang (X2) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kota Makassar.

Kata Kunci: Total Output Industri Besar, Output Industri Sedang, Pertumbuhan Ekonomi

This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u>.

## Pendahuluan

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003:55). Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997 (Saragih, 2003:74). Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi.

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001:127). Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah

satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Ada berbagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah di antaranya pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, tingkat pendapatan perkapita (PDRB), dan lain sebagainya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah (wikepedia.com). Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan dengan melihat produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Gustiana, 2017).

Di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 8,03%. Di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 8,2%. Di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar kembali mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 8,42%. Selanjutnya di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan pencapaian yang luar biasa yaitu sebesar 8,79%. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002:115). Kesinambungan pembangunan daerah relatif lebih terjamin ketika publik memberikan tingkat dukungan yang tinggi.

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Wong (2004) dalam Adi (2006) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah, sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah di setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemampuan dibidang industri atau memiliki sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Di satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dan disisi ada daerah yang tertinggal karena memiliki Pendapatan Asli Daerah yang rendah.

Pada tahun 2016 jumlah pendapatan asli daerah Kota Makassar sebesar Rp.971.859.753.605,76. Pada tahun 2017 jumlah pendapatan asli daerah Kota Makassar sebesar Rp.1.337.231.047.257,10. Dan selanjutnya pada tahun 2018 pendapatan asli daerah Kota Makassar mengalami penurunan sebesar Rp.1.185.453.010.989,65 menjadi meningkat ditahun 2019 sebesar Rp.1.624.776.235.586,00.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Alokasi Umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (priyo, 2006).

Abdullah dan Halim (2004:129) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang, transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam bentuk pengeluaran belanja modal. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif vana tercermin dalam peninakatan Pendapatan Asli Daerah. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harianto dan Hariadi mencoba meneliti Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. Dengan hasil penelitian Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Per Kapita.

Alokasi dana umum Kota Makassar pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.324.023.135. Selanjutnya di tahun 2017 tingkat alokasi dana umum Kota Makassar sebesar Rp. 1,324.023.135 dengan jumlah alokasi nana umum yang sama di tahun 2016. Kemudian di tahun 2018 jumlah alokasi dana umum sebesar Rp. 1.300,764,306. Pada tahun 2019 tinakat jumlah alokasi dana umum meningkat menjadi Rp. 1.389.664.807. Jumlah terendah alokasi dana umum Kota Makassar terjadi di tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 1.300.764.306. Dan jumlah tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan total sebesar Rp. 1,389,664,807.

Penelitian kedua yang di lakukan oleh Ulfi dan Endrawati mencoba meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. Hasil analisis membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan mencoba meneliti apakah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan sampel pemerintahan Kota Makassar.

Berdasarkan apa yang telah di paparkan diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar, (2) Pendapatan Asli Daerah berpenaaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar.

### **Metode Analisis**

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar.

# Metode Pengumpulan Data

#### 1.Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian (J. Supranto, 1999:34). Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dan dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS)

tentang Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar tahun 2007-2013.

#### 2.Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip dan buku-buku. (J. Supranto, 1999:47) Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dan arsip BPS Kota Makassar.

## Jenis dan Sumber Data Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data dalam penelitian ini adalah Data time series Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum dari tahun 2007-2013. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (field risearch) Metode Analisis Data

Teknik penelitian ini menggunakan meteode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kota makassar

## Analisis Regresi Linier Berganda Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

## Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F Statistika)

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel- variabel independen (X) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y). (Ghozali, 2011).

### Uji Signifikansi parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2016: 170) Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat membandingkan t- hitung dengan t-tabel. Pada penelitian ini menggunakan standar a = 0,05 yang berarti jika sig. 5% atau 0,05 maka H0 diterima, Ha ditolak dan jika sig < 5% maka H0 ditolak, Ha diterima.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah jumlah dana yang di transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Tujuan Dana Alokasi Umum ialah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam ranaka pelaksanaan desentralisasi.

#### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Adalah jumlah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, yang diperoleh dari penerimaan sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Hasil dan Pembahasan

#### **Hasil Penelitian**

Uji R Square (R2)

Tabel 1 Hasil Uji R Square (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,895°	,801	,602	7121487,282
a. Predictors	: (Constant), PAD	(X2), Alokasi dana u	ımum (X1)	
b. Depende	nt Variable: Pertu	mbuhan ekonomi (Y	)	

Sumber Tabel 1: Hasil olah data SPSS (Peneliti, 2021)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel diketahui nilai R Square sebesar 0,801. Yang berarti besar pengaruh variabel independen alokasi dana umum $(X_1)$  dan pendapatan asli daerah  $(X_2)$  terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 8,01%.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 2 Hasil Uji simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>								
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.		
	Regression	408249838517659,200	2	204124919258829,600	4,025	,049b		
1	Residual	101431162226943,600	2	50715581113471,800				
	Total	509681000744602,750	4					
a. Dep	oendent Variable	: Pertumbuhan ekonomi (Y)						
b. Pred	dictors: (Constan	t), PAD (X2), Alokasi dana umi	um (X1)					

Sumber Tabel 2: Hasil olah data SPSS (Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai Sig. Sebesar 0,049 < 0,05 dan nilai F  $_{Hitung}$  4,025 > F  $_{Tabel}$  sebesar 0,052. Diamana, jika nilai Sig. Lebih kecil dan nilai F hitung lebih besar dari f tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum (X1) dan pendapatan asli daerah (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients	a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients T		Sig.	Collinearity Statistics	
	B Std. Error Beta		Beta			ToleranceVIF	
(Constant)	12893608,292	110005770,418		,117	,917		
1 Dana Alokasi Umum (X1)	,065	,128	,160	,507	,660	,996	1,004
PAD (X2)	3,169E-005	,000	,890	2,817	,032	,996	1,004
a. Dependent Variable: Pert	umbuhan ekon	omi (Y)					

Sumber Tabel 3: Hasil olah data SPSS (Peneliti, 2021)

- Pengujian hipotesis Dana Alokasi Umum (X<sub>1</sub>) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), Berdasarkan hasil olah data SPSS 2020 pada tabel 8 diketahui nilai Sig. sebesar 0,660> 0,05 dan nilai t Hitung 0,507 < 0,816. Dimana dapat dilihat bahwa nilai t Hitung lebih kecil dari t Tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum (X<sub>1</sub>) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kota Makassar.
- 2. Pengujian hipotesis pendapatan asli daerah (X<sub>2</sub>) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai Sig. 0,032 < 0,05 dan nilai t<sub>Hitung</sub> 2,817 > t Tabel 0,816.

Dimana jika nilai signifikan lebih kecil daripada alpha dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (X<sub>2</sub>) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kota Makassar.

## Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
- 2. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
- 3. Dana Alokasi Umum dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Di satu pihak merupakan permintaan yang efektif dan di lain pihak menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Investasi di bidang modal akan mengarahkan kepada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan mendorong kepada spesialisasi dan penghematan biaya dalam produksi skala besar. Disarankan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan belanja modal, sumber daya alam, tenaga kerja pertambahan barang dan jasa dalam meningkatkan perumbuhan ekonomi Kota Makassar.

### Referensi

Anonim, 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tentang Pemerintahan Daerah

Anonim, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Ketenaga kerjaan.

Anonim, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Perindustrian.

Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta, PT. Rineka Cipta. Badan Pusat Statistik 2020 Kota Makassar.

Budiono, 1994. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi 1. Jogjakarta, Bpfe.

Datrini, Luh Kade, 2009. Dampak Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan di Propinsi Bali. Sarathi Vol.16 No.3.

Imam Ghosali, 2016. Penerapan Uji Asusmsi Klasik dan Analisis Regresi Linier berganda.

Iskandar, Putong, 2013. Economics, Pengantar Mikro dan Makro, Edisi Kelima, Jakarta, Mitra Wacana Media.

Kota Makassar Dalam Angka 2016-2020.

Kuznets, Simon, 1995. Economic Growth and Income Inequality". American Economic Review.

Mahendra, A. D, 2014. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja. Skripsi. Semarang, Universitas Diponegoro.

Sendjun, H Manululang, 1998. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta, PT Rineka Citra.

Sonny Sumarsono, 2003. Ekonomi manajemen sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Subijanto, 2011. Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia , Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, vol 17 no 6.

Sudarsono, 1990. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Jakarta, LP3S.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabet